

**PEMERINTAHAN LOKAL DI TENGAH TUNTUTAN EFISIENSI
ANGGARAN: TELAAH KRITIS ATAS MASA DEPAN DESENTRALISASI DI
INDONESIA**

Anggos Habil Seulalae^{1*}, Aldri Frinaldi², Hendranaldi³, Lince Magriasti⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Padang, Indonesia

Alamat : Jl.Prof.Dr. Hamka Air Tawar Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia,
25132

*Penulis Korespondensi: anggoshabil734@gmail.com

Abstract. Decentralization has been one of the most significant governance reforms aimed at improving government effectiveness, strengthening local democracy, and bringing public services closer to citizens. However, local governments in Indonesia are currently facing emerging challenges, including budget efficiency demands, digital transformation, fiscal dependency, and increasing public expectations regarding service quality. This study aims to analyze the position of local governments amid budget efficiency pressures and examine their implications for the future of decentralization in Indonesia. The research employs a qualitative approach using a literature review method. Data were collected from scholarly journals, academic books, policy documents, and research reports related to decentralization, local governance, and public administration.. The findings indicate that budget efficiency demands have encouraged local governments to adapt through digital transformation, institutional capacity strengthening, and improved financial management practices. Nevertheless, high fiscal dependence on the central government, disparities in regional capacities, and the growing tendency toward centralization remain significant challenges to achieving effective decentralization. The study concludes that the future of decentralization in Indonesia depends not only on the distribution of authority between central and local governments but also on the ability of local governments to strengthen institutional capacity, enhance fiscal independence, and consistently implement good governance principles. Strengthening these aspects is essential to ensure that decentralization continues to contribute to sustainable development and improved public service delivery.

Keywords: decentralization, local government, budget efficiency, regional autonomy, governance.

Abstrak. Desentralisasi merupakan salah satu agenda reformasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat demokrasi lokal, serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tantangan baru berupa tuntutan efisiensi anggaran, transformasi digital, ketergantungan fiskal, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi pemerintahan lokal di tengah tuntutan efisiensi anggaran serta mengkaji implikasinya terhadap masa depan desentralisasi di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian yang relevan dengan tema desentralisasi, pemerintahan lokal, dan tata kelola publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan efisiensi anggaran telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai penyesuaian dalam tata kelola pemerintahan, termasuk melalui transformasi digital, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, kesenjangan kapasitas antar daerah, serta kecenderungan penguatan kontrol pemerintah pusat masih menjadi tantangan dalam mewujudkan desentralisasi yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masa depan desentralisasi di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun kapasitas institusional, meningkatkan kemandirian fiskal, dan menerapkan prinsip good governance secara berkelanjutan.

Kata kunci: desentralisasi, pemerintahan lokal, efisiensi anggaran, otonomi daerah, tata kelola pemerintahan.

1. LATAR BELAKANG

Desentralisasi merupakan salah satu reformasi kelembagaan paling penting dalam perjalanan sistem pemerintahan Indonesia pasca-Reformasi 1998. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap praktik pemerintahan yang sangat terpusat pada era sebelumnya, yang dinilai kurang mampu mengakomodasi keberagaman karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat daerah. Melalui penerapan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Menurut Rondinelli (1981), desentralisasi merupakan proses transfer kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada unit pemerintahan yang lebih rendah guna meningkatkan efektivitas dan responsivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus memperkuat demokrasi lokal.

Selama tiga dekade implementasinya, desentralisasi telah membawa berbagai perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memperoleh ruang yang lebih besar untuk merancang kebijakan pembangunan, mengelola pelayanan publik, dan menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Berbagai inovasi pelayanan publik yang muncul di tingkat daerah menunjukkan bahwa desentralisasi mampu menciptakan kompetisi positif antarwilayah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Temuan berbagai penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi berkontribusi terhadap peningkatan akses pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah (Mutiarin et al., 2024).

Meskipun demikian, implementasi desentralisasi tidak selalu menghasilkan capaian yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Perbedaan kapasitas fiskal, kualitas sumber daya manusia, kondisi geografis, serta kemampuan kelembagaan menyebabkan munculnya kesenjangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebagian daerah mampu memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk menciptakan inovasi dan mempercepat pembangunan, sementara daerah lainnya masih menghadapi berbagai keterbatasan yang menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa

keberhasilan desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan yang diberikan, tetapi juga oleh kapasitas daerah dalam mengelola kewenangan tersebut secara efektif.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu efisiensi anggaran menjadi salah satu agenda penting dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Pemerintah pusat mendorong optimalisasi belanja negara dan daerah agar penggunaan sumber daya publik lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kebijakan efisiensi anggaran tersebut lahir dari kebutuhan untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah memberikan dampak nyata terhadap pembangunan. Namun demikian, kebijakan efisiensi juga memunculkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah yang selama ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Ketergantungan fiskal merupakan salah satu persoalan yang terus mewarnai pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan yang relatif luas dalam mengelola urusan pemerintahan, sebagian besar daerah masih mengandalkan transfer pusat sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Oates (1999), desentralisasi fiskal akan berjalan efektif apabila terdapat keseimbangan antara kewenangan pengeluaran dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Ketika kapasitas pendapatan daerah tidak berkembang secara proporsional dengan kewenangan yang dimiliki, maka daerah akan cenderung bergantung pada pemerintah pusat. Fenomena tersebut masih terlihat pada banyak daerah di Indonesia hingga saat ini.

Tuntutan efisiensi anggaran menjadi semakin kompleks ketika pemerintah daerah juga harus menghadapi ekspektasi masyarakat yang terus meningkat terhadap kualitas pelayanan publik. Masyarakat modern menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis teknologi. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu menyediakan layanan dasar secara memadai, tetapi juga harus mampu menghadirkan inovasi pelayanan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam situasi keterbatasan fiskal, pemerintah daerah menghadapi dilema antara kebutuhan menjaga kualitas pelayanan publik dan kewajiban melakukan efisiensi anggaran.

Perkembangan teknologi digital turut mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah. Transformasi digital telah menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi pelayanan publik, serta pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan merupakan bagian dari upaya modernisasi pemerintahan daerah. Menurut Dunleavy et al. (2006), digital *governance* memungkinkan pemerintah untuk menyederhanakan proses administrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, digitalisasi sering dipandang sebagai solusi untuk menjawab keterbatasan sumber daya yang dihadapi pemerintah daerah.

Namun demikian, transformasi digital tidak berlangsung secara merata di seluruh daerah. Perbedaan kapasitas fiskal dan kualitas sumber daya manusia menyebabkan tingkat kesiapan digital antar daerah sangat bervariasi. Daerah dengan sumber daya yang memadai cenderung lebih cepat mengadopsi teknologi dibandingkan daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pelayanan publik antar daerah apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang mampu memperkuat kapasitas daerah yang tertinggal.

Di sisi lain, muncul kecenderungan meningkatnya intervensi pemerintah pusat dalam berbagai aspek kebijakan pembangunan daerah. Beberapa pengamat menilai bahwa penguatan koordinasi nasional diperlukan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional. Namun, terdapat pula pandangan yang menganggap bahwa meningkatnya kontrol pusat berpotensi mengurangi ruang inovasi pemerintah daerah. Fenomena tersebut memunculkan perdebatan mengenai arah masa depan desentralisasi di Indonesia, khususnya terkait keseimbangan antara kebutuhan efisiensi nasional dan prinsip otonomi daerah.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi Indonesia saat ini memasuki fase baru yang lebih kompleks dibandingkan periode awal reformasi. Tantangan yang dihadapi tidak lagi terbatas pada distribusi kewenangan antara pusat dan daerah, tetapi juga mencakup isu kapasitas fiskal, efisiensi anggaran, transformasi digital, kualitas tata kelola, dan kemampuan adaptasi pemerintah daerah terhadap perubahan lingkungan strategis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana pemerintahan

lokal menghadapi tuntutan efisiensi anggaran dan bagaimana kondisi tersebut memengaruhi masa depan desentralisasi di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Desentralisasi

Desentralisasi merupakan konsep yang menjelaskan proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut Rondinelli (1981), desentralisasi merupakan transfer tanggung jawab perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya dari pemerintah pusat kepada organisasi atau unit pemerintahan yang lebih rendah. Konsep ini lahir dari keyakinan bahwa pemerintah yang berada lebih dekat dengan masyarakat akan lebih memahami kebutuhan lokal dibandingkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, desentralisasi dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas publik (Rondinelli, 1981).

Dalam perkembangannya, desentralisasi tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkuat demokrasi lokal. Smith (1985) menjelaskan bahwa desentralisasi memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan karena kebijakan publik disusun lebih dekat dengan lingkungan sosial masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan desentralisasi tidak hanya diukur dari efisiensi administrasi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperluas ruang partisipasi dan meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal (Smith, 1985).

Rondinelli (1981) membedakan desentralisasi ke dalam beberapa bentuk, yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Dalam konteks Indonesia, bentuk yang paling dominan adalah devolusi, yaitu penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan mengelola sumber daya sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Namun

demikian, devolusi juga menuntut adanya kapasitas kelembagaan yang memadai agar kewenangan yang diberikan dapat dijalankan secara efektif dan bertanggung jawab (Rondinelli, 1981).

Meskipun desentralisasi menawarkan berbagai keuntungan, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan tidak selalu menghasilkan peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kualitas institusi, kapasitas birokrasi, dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Faguet, 2014). Oleh karena itu, desentralisasi perlu dipahami sebagai proses yang tidak hanya berkaitan dengan distribusi kewenangan, tetapi juga penguatan kapasitas daerah agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal.

2. Teori *Fiscal Federalism*

Salah satu teori yang banyak digunakan dalam kajian desentralisasi adalah teori *Fiscal Federalism* yang dikemukakan oleh Oates (1999). Teori ini menjelaskan bahwa pelayanan publik akan lebih efisien apabila disediakan oleh tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah daerah dianggap memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan dan preferensi masyarakat dibandingkan pemerintah pusat sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal (Oates, 1999).

Menurut Oates (1999), keberhasilan desentralisasi fiskal bergantung pada keseimbangan antara kewenangan pengeluaran dan kapasitas pendapatan daerah. Apabila pemerintah daerah diberikan tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik tetapi tidak memiliki sumber pendapatan yang memadai, maka akan muncul ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas desentralisasi karena daerah kehilangan fleksibilitas dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam konteks Indonesia, teori *Fiscal Federalism* menjadi relevan karena sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Data berbagai penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di banyak daerah masih relatif rendah dibandingkan dengan dana transfer pemerintah pusat (Astria & Khoirunurrofik, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaksanaan

desentralisasi fiskal masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Selain itu, Oates (1999) menekankan bahwa desentralisasi fiskal harus disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Kewenangan yang besar tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan inefisiensi dan penyalahgunaan sumber daya publik. Oleh karena itu, tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tujuan desentralisasi fiskal.

3. Teori *Local Governance*

Konsep *local governance* berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan pemerintahan tradisional yang menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya aktor dalam proses pengambilan keputusan publik. Pierre dan Peters (2000) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan modern melibatkan berbagai aktor, termasuk sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan lembaga nonpemerintah. Dalam perspektif ini, pemerintah daerah tidak lagi berfungsi sebagai pengendali tunggal, melainkan sebagai fasilitator yang mengoordinasikan berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan bersama (Pierre & Peters, 2000).

Pendekatan *local governance* menekankan pentingnya kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan publik yang semakin kompleks, seperti kemiskinan, pengangguran, perubahan iklim, dan transformasi digital, tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan (Pierre & Peters, 2000).

Dalam konteks efisiensi anggaran, konsep *local governance* menjadi semakin penting karena pemerintah daerah dituntut untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia melalui kerja sama lintas sektor. Kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat dapat menjadi alternatif dalam menghadapi keterbatasan fiskal yang dialami pemerintah daerah. Dengan demikian, keberhasilan pemerintahan lokal tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal birokrasi, tetapi juga oleh kemampuan membangun jejaring dan kemitraan yang produktif.

4. Teori *Good Governance*

Konsep *good governance* berkembang sebagai paradigma yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan responsif. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP, 1997), pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan yang melibatkan negara, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab. Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan publik.

Dalam perspektif pemerintahan daerah, prinsip *good governance* menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan desentralisasi. Pelimpahan kewenangan kepada daerah harus diikuti dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi agar penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan prinsip *good governance* cenderung memiliki kualitas pelayanan publik yang lebih baik dibandingkan daerah yang masih menghadapi persoalan tata kelola (Mutiarin et al., 2024).

Efisiensi anggaran juga merupakan bagian dari prinsip *good governance*. Pengelolaan anggaran yang efisien tidak hanya berkaitan dengan penghematan biaya, tetapi juga kemampuan pemerintah menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran harus dipahami sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja publik, bukan sekadar mengurangi jumlah pengeluaran pemerintah (UNDP, 1997).

5. Teori Kapasitas Institusional (*Institutional Capacity*)

Kapasitas institusional merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Grindle (1997) menjelaskan bahwa kapasitas institusional mencakup kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, melaksanakan tugas dan fungsi, serta beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Organisasi yang memiliki kapasitas tinggi cenderung lebih mampu menjalankan kebijakan secara efektif dibandingkan organisasi yang memiliki keterbatasan sumber daya dan kompetensi.

Dalam konteks desentralisasi, kapasitas institusional pemerintah daerah menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan otonomi daerah. Pelimpahan kewenangan yang luas tidak akan menghasilkan manfaat yang optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sistem organisasi yang efektif, dan kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan (Grindle, 1997). Oleh karena itu, penguatan kapasitas daerah menjadi agenda penting dalam pembangunan pemerintahan lokal.

Kapasitas institusional juga berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi tuntutan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah yang memiliki kapasitas organisasi yang baik akan lebih mampu melakukan inovasi dan optimalisasi sumber daya tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, daerah yang memiliki kapasitas rendah cenderung mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan fiskal dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

6. Teori Digital Governance

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal sebagai *digital governance*. Menurut Dunleavy et al. (2006), *digital governance* merupakan pendekatan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi organisasi dan tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, digitalisasi menjadi salah satu strategi utama untuk menjawab tantangan efisiensi anggaran. Pemanfaatan teknologi memungkinkan penyederhanaan proses birokrasi, pengurangan biaya operasional, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan. Berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung efisiensi penggunaan sumber daya pemerintah (Soesanto & Rumbekwan, 2025).

Namun demikian, keberhasilan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan institusi dan sumber daya manusia. Digitalisasi tidak hanya membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai, tetapi juga perubahan budaya organisasi serta peningkatan kompetensi aparatur pemerintah. Oleh karena itu, transformasi digital harus

dipahami sebagai proses perubahan kelembagaan yang menyeluruh, bukan sekadar penerapan teknologi dalam aktivitas pemerintahan (Dunleavy et al., 2006).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) untuk menganalisis dinamika pemerintahan lokal di tengah tuntutan efisiensi anggaran serta implikasinya terhadap masa depan desentralisasi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan. Menurut Creswell dan Creswell (2018), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna yang dibangun oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Dalam penelitian ini, fenomena yang dikaji adalah hubungan antara kebijakan efisiensi anggaran, kapasitas pemerintahan daerah, dan keberlanjutan desentralisasi.

Menurut Snyder (2019), studi literatur dapat menjadi metode penelitian yang berdiri sendiri apabila dilakukan secara sistematis dan menghasilkan analisis kritis terhadap pengetahuan yang telah ada.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui berbagai publikasi ilmiah, seperti artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, prosiding konferensi, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan lembaga internasional yang relevan dengan tema desentralisasi, pemerintahan lokal, dan efisiensi anggaran.

Untuk meningkatkan validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur yang memiliki fokus kajian serupa. Menurut Patton (2015), triangulasi sumber merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memeriksa konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian akademik, dokumen kebijakan pemerintah, dan laporan lembaga internasional.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam mengenai posisi pemerintahan lokal dalam menghadapi tuntutan

efisiensi anggaran serta implikasinya terhadap masa depan desentralisasi di Indonesia. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur administrasi publik dan pemerintahan daerah, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan pemerintahan lokal yang lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Desentralisasi Indonesia dalam Fase Transisi Baru

Tiga dekade setelah implementasi otonomi daerah, desentralisasi di Indonesia memasuki fase perkembangan yang berbeda dibandingkan masa awal reformasi. Jika pada periode awal fokus utama pemerintah adalah mendistribusikan kewenangan kepada daerah, maka saat ini perhatian mulai bergeser pada efektivitas penggunaan kewenangan tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan belum secara otomatis menghasilkan peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di seluruh daerah karena masih terdapat kesenjangan kapasitas yang cukup besar antar wilayah (Astriana & Khoirunurrofik, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak lagi dapat diukur hanya dari aspek regulatif, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam mengelola kewenangan secara efektif.

Tuntutan efisiensi anggaran memperlihatkan bahwa pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada situasi yang semakin kompleks. Di satu sisi, daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sementara di sisi lain terdapat tekanan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Dalam perspektif *Fiscal Federalism*, kondisi ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kewenangan dan kapasitas fiskal sebagaimana dikemukakan oleh Oates (1999). Ketika kapasitas fiskal daerah tidak berkembang secara seimbang dengan beban kewenangan yang diberikan, maka efektivitas desentralisasi berpotensi menurun.

2. Efisiensi Anggaran dan Dilema Pemerintahan Lokal

Kebijakan efisiensi anggaran pada dasarnya merupakan langkah yang rasional dalam tata kelola keuangan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Namun,

dalam praktiknya, efisiensi sering kali dipersepsikan sebagai pengurangan belanja semata. Padahal, konsep efisiensi dalam administrasi publik lebih menekankan pada kemampuan menghasilkan keluaran yang lebih baik dengan penggunaan sumber daya yang proporsional (UNDP, 1997).

Bagi pemerintah daerah, kebijakan efisiensi anggaran sering kali menimbulkan dilema. Pengurangan atau pembatasan anggaran dapat berdampak pada berkurangnya ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi tersebut menjadi lebih berat bagi daerah yang masih memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat. Temuan beberapa studi menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang rendah cenderung lebih rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional dibandingkan daerah yang memiliki kapasitas pendapatan asli daerah yang kuat (Wahyudi et al., 2023).

Selain itu, efisiensi anggaran juga dapat memengaruhi kapasitas inovasi pemerintah daerah. Inovasi pelayanan publik sering kali membutuhkan investasi awal yang tidak sedikit, terutama dalam pengembangan teknologi dan peningkatan kompetensi aparatur. Ketika ruang fiskal semakin terbatas, pemerintah daerah berpotensi lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan operasional dibandingkan pengembangan inovasi jangka panjang. Akibatnya, upaya transformasi pelayanan publik dapat berjalan lebih lambat dibandingkan yang diharapkan.

3. Ketergantungan Fiskal sebagai Tantangan Desentralisasi

Salah satu persoalan mendasar yang masih dihadapi dalam implementasi desentralisasi adalah tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Meskipun otonomi daerah telah berlangsung lebih dari dua dekade, sebagian besar daerah masih mengandalkan transfer pusat sebagai sumber utama pendapatan daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian keuangan daerah sebagaimana yang diharapkan dalam teori *Fiscal Federalism* (Oates, 1999).

Ketergantungan fiskal memiliki konsekuensi yang cukup signifikan terhadap kapasitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan. Daerah yang sangat

bergantung pada transfer pusat cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih rendah dalam mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan lokal. Selain itu, perubahan kebijakan fiskal di tingkat nasional dapat secara langsung memengaruhi stabilitas program pembangunan daerah. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mengurangi semangat inovasi dan kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan.

Ketimpangan fiskal antar daerah juga menjadi isu yang perlu mendapat perhatian. Daerah yang memiliki basis ekonomi kuat cenderung mampu menghasilkan pendapatan asli daerah yang lebih besar dibandingkan daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya ekonomi. Akibatnya, kualitas pelayanan publik dan kapasitas pembangunan antar daerah menjadi tidak merata. Situasi ini menunjukkan bahwa desentralisasi masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.

4. Fenomena Resentralisasi dalam Praktik Desentralisasi Kontemporer

Perkembangan tata kelola pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan penguatan peran pemerintah pusat dalam berbagai sektor strategis. Fenomena ini sering disebut sebagai *resentralisasi kebijakan*, yaitu kondisi ketika pemerintah pusat kembali mengambil peran yang lebih dominan dalam menentukan arah pembangunan nasional. Meskipun tidak menghilangkan prinsip otonomi daerah secara formal, kecenderungan tersebut memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam menentukan prioritas kebijakan. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan menjaga keselarasan pembangunan nasional dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di berbagai daerah (Pierre & Peters, 2000).

Di satu sisi, penguatan koordinasi nasional dapat menghasilkan standar pelayanan yang lebih seragam dan mengurangi kesenjangan kualitas pelayanan publik antar daerah. Namun, di sisi lain, peningkatan kontrol pemerintah pusat berpotensi mengurangi fleksibilitas daerah dalam merespons kebutuhan lokal yang bersifat spesifik. Oleh karena itu, masa depan desentralisasi Indonesia perlu diarahkan pada keseimbangan antara koordinasi nasional dan ruang inovasi daerah agar tujuan pembangunan nasional dapat berjalan seiring dengan penguatan pemerintahan lokal.

5. Transformasi Digital Sebagai Strategi Efisiensi Pemerintahan Lokal

Salah satu temuan penting dalam berbagai penelitian terbaru adalah meningkatnya peran transformasi digital sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi birokrasi daerah. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pemerintah daerah menyederhanakan proses administrasi, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran. Digitalisasi juga mampu mengurangi biaya transaksi birokrasi yang selama ini menjadi salah satu sumber inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Putra et al., 2024).

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Melalui integrasi data dan layanan digital, pemerintah daerah dapat meningkatkan akurasi perencanaan, efektivitas pengawasan, dan kualitas pengambilan keputusan. Berbagai daerah yang berhasil mengembangkan sistem digital menunjukkan peningkatan efisiensi administrasi sekaligus peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (Soesanto & Rumbekwan, 2025).

Namun demikian, transformasi digital bukanlah solusi yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh daerah. Ketersediaan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan kemampuan fiskal daerah menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan digitalisasi. Penelitian mengenai kapasitas pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi daerah dalam mengelola sumber daya dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Lewis & Hendrawan, 2022).

6. Kapasitas Institusional Sebagai Faktor Penentu

Kajian ini menunjukkan bahwa kapasitas institusional merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pemerintahan lokal dalam menghadapi tuntutan efisiensi anggaran. Menurut Grindle (1997), kapasitas institusional mencakup kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, perbedaan

kapasitas institusional antar daerah masih menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan kinerja pemerintahan daerah.

Daerah yang memiliki sumber daya manusia berkualitas, kepemimpinan yang inovatif, dan sistem organisasi yang baik cenderung mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih efektif meskipun menghadapi keterbatasan fiskal. Sebaliknya, daerah yang memiliki kapasitas organisasi rendah sering kali mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kewenangan yang dimiliki menjadi program pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik dalam rezim desentralisasi di Indonesia.

Peningkatan kapasitas institusional tidak hanya berkaitan dengan pelatihan aparatur, tetapi juga mencakup reformasi organisasi, penguatan sistem manajemen kinerja, serta pengembangan budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas daerah harus menjadi agenda utama dalam pengembangan desentralisasi ke depan.

7. Local Governance Dan Kolaborasi Aktor

Kompleksitas permasalahan publik saat ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan fungsi pembangunan. Konsep *local governance* menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, media, dan masyarakat sipil dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik (Pierre & Peters, 2000). Dalam situasi keterbatasan anggaran, kolaborasi menjadi strategi yang semakin relevan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan daerah.

Melalui pendekatan kolaboratif, pemerintah daerah dapat mengakses sumber daya tambahan yang tidak tersedia dalam struktur birokrasi formal. Kerja sama dengan perguruan tinggi dapat mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), sementara kemitraan dengan sektor swasta dapat memperluas akses terhadap teknologi dan inovasi. Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak selalu harus dilakukan melalui pengurangan program, tetapi juga melalui optimalisasi jejaring kerja sama yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

8. Good Governance Dan Kualitas Belanja Publik

Dalam perspektif *good governance*, efisiensi anggaran tidak boleh dipahami sebagai pengurangan belanja semata. Efisiensi harus dipandang sebagai upaya meningkatkan kualitas penggunaan anggaran sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan pandangan UNDP (1997) yang menempatkan efektivitas dan akuntabilitas sebagai komponen utama tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola apabila disertai dengan sistem akuntabilitas yang kuat dan pengelolaan keuangan yang transparan. Studi terhadap 508 kabupaten/kota di Indonesia menemukan adanya hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan kinerja tata kelola pemerintahan yang diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Oleh karena itu, tantangan utama pemerintah daerah saat ini bukan hanya bagaimana menghemat anggaran, tetapi bagaimana memastikan bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan memberikan dampak yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Orientasi pada hasil (*outcome-oriented budgeting*) perlu diperkuat agar kualitas belanja publik dapat meningkat secara berkelanjutan.

9. Implikasi Dan Masa Depan Indonesia Emas 2045

Agenda Indonesia Emas 2045 menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagian besar layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi, berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberhasilan agenda pembangunan nasional sangat bergantung pada kapasitas dan kinerja pemerintahan lokal.

Dalam konteks tersebut, tuntutan efisiensi anggaran seharusnya tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai momentum untuk melakukan reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Transformasi digital, penguatan kapasitas fiskal, peningkatan

kompetensi aparatur, dan penguatan kolaborasi lintas sektor merupakan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan masa depan.

Berdasarkan hasil kajian, masa depan desentralisasi di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis. Desentralisasi tidak lagi hanya berkaitan dengan distribusi kewenangan antara pusat dan daerah, tetapi juga menyangkut kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif, memanfaatkan teknologi, dan membangun kolaborasi yang produktif.

Berbagai studi menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal daerah masih menjadi agenda yang belum terselesaikan. Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih menjadi karakteristik dominan dalam sistem keuangan daerah Indonesia. Oleh karena itu, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi digital governance, dan pengembangan inovasi fiskal daerah menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat pada masa mendatang.

Secara keseluruhan, masa depan desentralisasi tidak terletak pada penambahan kewenangan semata, tetapi pada kemampuan pemerintah daerah mengubah kewenangan tersebut menjadi pelayanan publik yang berkualitas, tata kelola yang akuntabel, dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, desentralisasi akan tetap relevan sebagai instrumen penguatan demokrasi dan pembangunan daerah apabila didukung oleh kapasitas institusional yang kuat, tata kelola yang baik, dan sistem fiskal yang lebih mandiri.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa tuntutan efisiensi anggaran telah menjadi salah satu isu utama yang memengaruhi kinerja pemerintahan lokal di Indonesia. Pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam situasi tersebut, transformasi digital, penguatan tata kelola keuangan daerah, dan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi strategi penting untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Efisiensi anggaran tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai pengurangan pengeluaran, tetapi harus dipahami sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja publik agar menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat masih menjadi tantangan mendasar dalam pelaksanaan desentralisasi. Ketergantungan tersebut membatasi fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan serta berpotensi mengurangi kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Selain itu, kesenjangan kapasitas fiskal, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan kelembagaan antar daerah menyebabkan implementasi desentralisasi menghasilkan capaian yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

Di samping itu, munculnya kecenderungan penguatan koordinasi dan kontrol pemerintah pusat menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah memasuki fase baru yang memerlukan keseimbangan antara efektivitas pembangunan nasional dan penghormatan terhadap prinsip otonomi daerah. Oleh karena itu, masa depan desentralisasi Indonesia perlu diarahkan pada model tata kelola yang mampu mengintegrasikan koordinasi nasional dengan ruang inovasi daerah sehingga pemerintah daerah tetap memiliki kapasitas untuk merespons kebutuhan masyarakat secara adaptif.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masa depan desentralisasi di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam mengelola kewenangan tersebut secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas institusional, peningkatan kemandirian fiskal, optimalisasi transformasi digital, serta penerapan prinsip good governance menjadi prasyarat utama untuk memastikan bahwa desentralisasi tetap relevan sebagai instrumen pembangunan daerah dan penguatan demokrasi lokal menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Adapun saran yaitu pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kemandirian fiskal, dan mengoptimalkan transformasi digital untuk mendukung efektivitas pelayanan publik di tengah tuntutan efisiensi anggaran. Di sisi lain, pemerintah pusat perlu menjaga keseimbangan antara penguatan koordinasi nasional dan pemberian ruang inovasi bagi daerah. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan

mengkaji implementasi desentralisasi pada daerah tertentu melalui pendekatan empiris agar menghasilkan rekomendasi yang lebih kontekstual dan aplikatif.

DAFTAR REFERENSI

- Astriaana, S., & Khoirunurrofik. (2024). Fiscal decentralization and governance performance: Empirical evidence from district and city governments in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 13(1), 15–29.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). *Digital era governance: IT corporations, the state, and e-government*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Faguet, J. P. (2014). Decentralization and governance. *World Development*, 53, 2–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>
- Grindle, M. S. (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Cambridge, MA: Harvard Institute for International Development.
- Hummel, D., & Kusumasari, B. (2025). Local government financial performance and decentralization in Indonesia. *Public Finance Review*, 58(2), 145–170.
- Lewis, B. D., & Hendrawan, A. (2022). The impact of local government capacity on public service delivery: Lessons learned from decentralized Indonesia. *Economies*, 10(12), 323. <https://doi.org/10.3390/economies10120323>
- Mutiarin, D., Moner, Y., Nurmandi, A., & Nuriyanto, N. (2024). Interoperability governance in Indonesian local government digital transformation. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(1), 1–15.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state*. London, England: Macmillan Press.
- Putra, I. M. A. W., Suharnoko, D., Salsabila, F., & Putri, D. D. U. (2024). Implementation of fiscal decentralization in the digital era: Effectiveness and challenges in Indonesia. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 171–195.
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The territorial dimension of the state*. London, England: George Allen & Unwin.

- Soesanto, H., & Rumbekwan, M. (2025). Digital transformation and public service innovation in Indonesian local government. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 85–102.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Syafri, R. A., Sofilda, E., & Suparyati, A. (2024). Determinan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 9(4), 421–438.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York, NY: United Nations Development Programme.
- Wahyudi, T., Nawawi, J., & Pohan, F. S. (2023). Fiscal decentralization and local government performance in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 213–228.
- Wardana, R., Pratama, A., & Nugroho, D. (2025). Agile governance and local government adaptation in the era of fiscal efficiency. *Journal of Regional Governance*, 7(1), 45–63.
- Zamhur, & Marantika, A. (2026). Digital tax governance in optimizing local own-source revenue: Evidence from Kampar Regency, Indonesia. *Dinasti International Journal of Economics, Finance and Accounting*, 7(1), 1–15.
- Zulkarnaini, Islahuddin, Abdullah, S., & Fahira, A. (2024). Systematic literature review: Menilik multi aspek implementasi desentralisasi fiskal pemerintah daerah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4353–4368.